BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah Indonesia

2.1.1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23 ayat (1) :

" Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan tiap tahun dengan Undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu".

ayat (5):

"Untuk memeriksa tanggungjawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat".

2.1.2. ICW (Indoneche Comptabiliteitswet)

dalam pasal (1) :

" Keuangan Negara Republik Indonesia diurus dan dipertanggungjawabkasn menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".

Pengertian Keuangan Negara di atas adalah keuangan negara dalam arti sempit yaitu yang berkaitan degnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi dalam hal ini tidak berkaitan dengan anggaran daerah, anggaran perusahaan, dan sejenisnya.

2.1.3. Undang-undang APBN

pasal (7)

"Ketentuan-ketentuan dalam ICW yang bertentangan dengan bentuk susunan dan isi UU-APBN dinyatakan tidak berlaku lagi".

Mengenai bentuk UU-APBN seperti yang terlihat di bawah ini dan klasifikasi yang dianut berbeda dengan ICW yaitu:

ANGGARAN	LAMPIRAN	URAIAN
Anggaran Pendapatan Rutin	I	- per jenis penerimaan - masing-masing jenis dibagi lagi per nomor kode (mata anggaran).
Anggaran Pendapatan Pembangunan	II	- per nomor kode (mata anggaran)
Anggaran Belanja Rutin	III	- sektor - sub sektor
Anggaran Belanja Pembangunan	IV	a. - Rupiah tanpa nilai rupiah bantuan proyek/ teknis dan kredit ekspor. - dibagi dalam sektor dan sub sektor b. - Nilai rupiah bantuan proyek/teknis dan bantuan ekspor. - dibagi persektor.

Adapun mengenai susunan UU-APBN dibedakan menjadi :

Anggaran Pendapat Rutin dibagi menjadi :

a. Per jenis penerimaan

b. Masing-masing jenis penerimaan diperinci permata anggaran

Anggaran Pendapatan Pembangunan dibagi menjadi :

a. Nilai lawan bantuan program

b. Nilai lawan bantuan proyek

Anggaran Belanja Rutin

a. Sektor

b. Subsektor

2.1.3. KEPRES tentang Pelaksanaan APBN

Untuk keperluan operasional, terutama untuk hal-hal yang sering dijumpai dalam pelaksanaan APBN maka diterbitkan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Dari

berbagai macam Kepres yang telah dikeluarkan, yang terakhir adalah Kepres No. 29 tahun 1994, Kepres ini selain mengatur lebih lanjut ketentuan ICW serta peraturan pelaksanaanya.

Yang menarik dalam Keprcs ini adalah :

a. Tahun anggaran berlaku dari tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam suatu tahun anggaran mencakup semua penerimaan dan pengeluaran yang selama tahun anggaran:
   1. dimasukan dalam dan atau dikcluarkan dari kas ncgara
   2. diperhitungkan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh menkeu.
   3. diterima dan dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

2.2. Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintah Indonesia

Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintah adalah suatu hal yang esensi untuk digunakan dalam menganalisa operasi keuangan yang benar serta untuk mempersiapkan dan menyajikan laporan tahunan yang diperlukan.

Adapun Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan National Committe on Goverment Accounting (NCGA) adalah scbagai bcrikut :

1. Kepatuhan Hukum dan Operasi Keuangan (Legal Compliance and Financial Operation)

   Sistem Akuntansi Pemerintah harus dapat memungkinkan :

a. memperlihatkan seluruh penerapan peraturan hukum yang berhubungan dengan itu;
b. menentukan kewajaran dan pengungkapan yang cukup tentang posisi keuangan dan hasil operasi keungan dari unit pemerintah.

2. Pertentangan Antara Prinsip Akuntan dan Ketentuan Hukum.

Jika terdapat pertentangan antara ketentuan hukum dengan prinsip yang dapat diterapkan pada unit pemerintah, maka yang diutamakan adalah ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun demikian sedapat mungkin sistem akuntansi pemerintah harus

memungkinkan mengungkapkan sepatutnya dan hasil operasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang dapat diterima umum dan dapat diterapkan kepada suatu unit pemerintah.

3. Anggaran dan Akuntansi Anggaran

Suatu anggaran tahunan hendaklah digunakan oleh setiap unit pemerintah, apakah dikehendaki oleh hukum atau tidak, dan sistem akuntansi harus menyelenggarakan pengontrolan atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

4. Akuntansi Fund

Sitem Akuntansi Pemerintah direncanakan, diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar fund. Suatu fund didefinisikan sebagai suatu kesatuan keuangan dan akuntansi yang berdiri sendiri untuk mencatat kas atau sumber dana lainnya, yang seluruhnya dihubungkan dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan equities yang dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan khusus atau untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan khusus, restriksi-restriksi atau limitasi-limitasi.

Adapun jenis-jenis fund yang diakui dan digunakan dalam akuntansi pemerintah yaitu :

General Fund

Mempertanggungjawabkan semua transaksi-transaksi keuangan yang tidak dipertanggung jawabkan oleh fund lainnya.

Special Revenue Fund

Fund untuk mempertanggungjawabkan hasil dari hasil sumber pendapatan khusus (selain special assesment fund) atau untuk membiayai kegiatan yang memerlukan undang-undang khusus.

Debt Service Fund.

Fund untuk mempertanggung jawabkan pembayaran bunga dan pokok pinjaman atas pinjaman jangka panjang (long term debt) selain special assesment dan Revenue Bonds.

Capital Project Fund

Fund untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran uang yang digunakan untuk memperoleh fasilitas modal selain yang dibiayai oleh special assesment dan enterprise fund.

Enterprise Fund

Fund untuk mempertanggungjawabkan jasa yang diberikan kepada masyarakat umum dimana semua atau sebagian besar biaya dibebankan kepada pemakai jasa tersebut.

Trust and Agency Fund

Fund untuk mempertanggungjawabkan harta yang dikuasai oleh unit-unit pemerintah saebagai badan kepercayaan atau agen perorangan, organisasi swasta dan unit-unit lainnya.

Intergovermental Service Funds

Funds untuk mempertanggungjawabkan pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus dan jasa yang dilakukan oleh unit organisasi pemerintah untuk bagian dari organisasi pemerintah lain dalam jurisdiksi pemerintah yang sama.

Special Assesment Fund

Fund untuk mempertanggungjawabkan uang yang dipergunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas umum yang khususnya memberikan manfaat bagi mereka yang dikenakan pungutan tersebut.

5. Basis akuntansi

Basis akuntansi accrual direkomendasikan untuk Enterprise, Trust, Capital Project, Special Assesment dan Intra Govermental Service Fund. Basis Accrual yang dimodifikasikan, direkomendasikan untuk General, Special Revenue, dan Debt Service Fund. Modifikasi basis akuntansi Accrual didefinisikan sebagai metode akuntansi dimana pengeluaran selain dari pada saat utang terjadi, dan pendapatan ketika diterima secara kas kecuali untuk material atau pendapatan ditangguhkan untuk mencerminkan secara tepat pungutan pajak dan pendapatan yang diperoleh.

6. Klasifikasi perkiraan (Classification of Account)

Penghasilan-penghasilan pemerintah akan diklasifikasikan berdasarkan sumber (fund) dan dana (source). Pengeluaran-pengeluaran akan diklasifikasikan menurut fund, fungsi, unit organisasi, aktivitas, character dan golongan pokok dari objek sesuai dengan standar klasifikasi yang diakui.

7. Terminologi Umum Klasifikasi

Suatu terminologi yang umum dan klasifikasi harus dipergunakan secara konsisten pada seluruh anggaran, perkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan.

8. Laporan Keuangan

Laporan Keuangan dan laporan lainnya yang menampakan kondisi sekarang dari perkiraan anggaran dan pemilikan dipersiapkan secara periodik untuk mengendalikan operasi-operasi keuangan. Pada tiap-tiap akhir tahun fiskal , laporan keuangan tahunan yang komprehensif meliputi seluruh fund dan operasi keuangan unit pemerintah disiapkan dan dipublikasikan.

Secara umum laporan keuangan unit pemerintah mencakup penyajian dua macam data

1. Laporan tahunan dan daftar-daftar

Secara langsung diperdiapkan dan semata-mata dari perkiraan-perkiraan dan meliputi suatu periode kurang dari satu tahun sampai dua tahun pajak lamanya.

2. Tabel-tabel statistik

Menyajikan data keuangan untuk periode yang lebih lama sampai dengan sepuluh tahun , yang terdiri dari data keseluruhan atau sebagian, yang tidak tercatat dalam akuntansi.

Laporan keungan ini sebagian besar dibuat di Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.3. Sistem Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah

1.3.1. Sistem

Jika kita perhatikan dengan seksama, diri kita terdiri dari berbagai sistem untuk mengantar kita kepada tujuan hidup. Sudah banyak ahli yang berhasil mengungkapkan berbagai sistem yang bekerja dalam diri kita (misalnya sistem kekebalan tubuh untuk menghadapi penyakit cacar dan diphteri), namun masih banyak pula berbagai sistem yang belum dapat diungkapkan dengan tehnologi yang sekarang telah dimiliki oleh manusia (misalnya sistem kekebalan untuk menghadapi penyakit AIDS) . Setiap sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, yang disebut sebagai subsistem.

Pendekatan sistem memberikan banyak manfaat dalam memehami lingkungan kita. Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuatu dipandang dari sudut pandangan sistem, yang berusaha menemukan struktur elemen yang membentuk sistem tersebut dan mengidentifikasi proses pekerjaan tiap elemen yang membentuk sistem tersebut. Dengan memehami struktur sistem dan proses sistem, seseorang akan dapat menjelaskan mengapa tujuan suatu sistem tidak tercapai.

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Maka dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut :

1. Setiap sistem terdiri dari elemen-elemen ;
2. Elemen-elemen tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan;
3. Elemen sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem ;
4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lain yang lebih besar;

Dari uraian pengertian sistem secara umum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sestem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau secara rutin terjadi seperti

halnya proses Akuntansi Pemerintah yang dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran Bandung.

2.3.2. Sistem Akuntansi

Setelah diuraikan secara jelas mengenai sistem secara umum, maka dapatlah diambil suatu pengertian tentang sistem akuntansi, yaitu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh menejemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Maka definisi elemen suatu sistem akuntansi pokok adalah :

a. Formulir ;

Formulir merupakan dokumen pertama untuk merekam transaksi, contoh : faktur penjualan, dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

b. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangn lainnya.

c. Buku Besar

Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan elemen-elemen informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

d. Buku Pembantu

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar di perlukan rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yanga tercantum dalam rekening piutang dagang yang tercantum dalam neraca merasa perlu dirinci lebih lanjut menurut nama debitur sejumlah debitur tersebut.

e. Laporan

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran dan laporan harga pokok penjualan.

2.2.3. Sistem Akuntansi Pemerintah

Setelah diuraikan secara jelas tentang pengertian sistem dan sistem akuntansi secara umum, maka dapat digunakan sebagai dasar acuan untuk menjelaskan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah. Karena Akuntansi Pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertujuan tidak untuk mencara laba; maka sistem akuntansi pemerintah itu sendiri terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sama untuk kesatuan pemerintah dan diatur oleh lembaga legeslatif eksekutif, serta yudisial sebagai alat pemerintah yang secara hukum mengurus dan menyediakan jasa-jasa umum tertentu kepada warga negaranya. Dari definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi mikro yang fungsinya khusus menyajikan informasi keuangan bagi lebaga pemerintah.

Disamping sifat lembaga pemerintah, terdapat dua faktor lain yang mempengaruhi bentuk akuntansi pemerintah. Yaitu :

a. Sistem Pemerintah

Sistem pemerintah suatu negara sangat besar pengaruhnya terhadap bentuk akuntansi pemerintah negara yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, bentuk akuntansi pemerintah berbeda dari suatu negara ke negara lainnya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan sistem pemerintah negara yang bersangkutan.

b. Mekanisme Pengurusan Keuangan Negara dan Sistem Anggaran Negara:

Kalau tadi telah dikemukakan bahwa akuntansi pemerintah adalah akuntansi mikro yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan bagi lembaga pemerintah maka bila ditelusuri lebih jauh, akuntansi pemerintah sebenarnya adalah penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada saat pelaksanaan anggaran negara. Di katakan demikian, karena fungsi akuntansi pemerintah pada dasarnya adalah untuk mencatat, meringkas dan melaporkan serta menggolongkan pelaksanaan anggaran negaara. Karena itulah akuntansi pemerintah kadang-kadang disebut pula sebagai akuntansi anggaran sesuai apa yang dilakukan oleh PPDIA Bandung.

Dengan eratnya kaitan antara akuntansi pemerintah dengan pelaksanaan anggaran negara, maka praktis penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaranlah yang melakukan pengurusan sekaligus pembukuan keuangan negara lewat dokumen-dokumen anggaran yang dikirimkan dari kantor-kantor daerah diseluruh Indonesia.

2.4. Sistem Akuntansi Pemerintah Indonesia

2.4.1. Perbandingan Akuntansi Pemrintah dengan Akuntansi Komersial

Apabila dilihat secara menyeluruh antara akuntansi pemerintah dan akuntansi komersial, maka perbedaan utama adalah dalam hal tujuannya. Dalam perusahaan (komersial) pada umumnya perhatian organisasi terutama ditujukan untuk menghasilkan keuntungan (laba) bagi pemiliknya, sebaliknya pda pemerintah perhatian terutama diarahkan pada pemberian jasa pada masyarakat tanpa didasarkan pada keuntungan.

Tanpa adanya dasar untuk mencari suatu keuntungan dari kegiatan pemerintah maka akan tercermin pada akuntansi pemerintah antara lain :

- tidak ada akuntansi defernsiasi atas barang milik negara yang digunakan ;
- tidak perlu adanya penilaian kembali atas nilai aktiva tetap walaupun nilai perolehan yang pertama telah jauh berbeda dengan likuidasinya.
- tidak dijumpai adanya cadangan piutang berhubung tidak dapat ditagih suatu piutang 100%;

Selain tiadanya motif keuntungan pada pemerintah, juga terdapat hal-hal yang tidak terdapat pada perusahaan (komersial) pada umumnya yaitu :

- penerimaan anggaran diperoleh pemerintah terutama dari pad wajib pajak yang tidak mengharapkan balas jasa secara proporsional terhadap jumlah pembayaran/penyetoran yang telahmereka penuhi;
- harta/kekayaan milik negara pada dasarnya adalah milik rakyat, tetapi rakyat sebagai pemilik tidak dapat menjual dan sebagainya saeperti halnya pada perusahaan dimana pemegang sahamnya dapat menjual sahamnya pada orang lain;
- demikian rakyat sebagai pemilik tidak dapat mengharapkan adanya sisa kekayaan yang dapat diperoleh berhubung adanya likuidasi suatu pemerintah;
- khususnya akuntansi pemerintah Indonesia pencatatan tidak didasarkan atas double entry (pembukuan berpasangan) melainkan single entry (pembukuan tunggal).

2.4.2. Ciri-ciri sistem baru Akuntansi Pemerintah Indonesia

2.4.2.1. Sistem Lama Akuntansi Pemerintah Indonesia

Akuntansi Pemerintah Indonesia saat ini terdiri dari tiga jenis akuntansi yang masing-masing merupakan suatu kesatuan akuntansi sendiri-sendiri, dengan informasi yang dihasilkan berbeda satu sama dengan yang lainnya. Ketiga akuntansi tersebut adalah :

1. Akuntansi Anggaran

hasil akhir dari akuntansi ini adalah Sumbangan Perhitungan Anggaran.

2. Akuntansi Infentaris

hasil akhir akuntansi ini ialah nilai masing-masing kelompok inventaris milik pemerintah yang terdapat pada masing-masing departemen dan lembaga non departemen.

3. Akuntansi Kas

hasil akhir akuntansi ini adalah posisi kas pemerintah pada suatu periode.

Ketiga jenis akuntansi tersebut diharapkan akan mampu memenuhi tujuan akuntansi pemerintah yang berupa tujuan sebagai alat menejemen dan tujuan akuntabilitas (pertanggung jawaban pengurusan keuangan negara) . Dari kedua tujuan tersebut, nampak yang mendapat pertahatian utama adalah tujuan akuntabilitas sebagaimana dapat kita lihat dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5) dan lebih didukung lagi dengan ketentuan dalam Indonesische Comtabiliteitswet (ICW) Staatblad 1925 No, 448 yang diterjemahkan sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia. Salat satu pasal dalam ICW yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara yakni psal 69 yang berbunyi." Pemerintah membuat suatu perhitungan anggaran dengan menyebut tanggal penutupannya". Perhitungan Anggaran tersebut dikenal dengan PAN (Perhitungan Anggaran Negara) yang berisikan informasi jumlah kredit anggaran dengan realisasinya selama satu tahun, data-data realisasi anggaran tersebut diperoleh dari hasil pengolahan data keuangan pada PPDIA .

Ternyata dari ketiga jenis akuntansi tersebut belum mampu memenuhi tujuan akuntansi pemerintah baik akuntabilitas maupun menejerial. Akuntansi Anggaran misalnya, produk akhir akuntansi akuntansi anggaran adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah anggaran, realisasinya, perbedaan diantara keduanya dan penjelasan sebab-sebab perbedaan tersebut dalam satu tahun anggaran untuk tiap bagian anggaran, loran ini dilakukan pada bidang Rekonsiliasi PPDIA. dan laporan tersebut berupa Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA), atas dasar SPA ini tiap departemen dan lembaga non departemen (bagian anggaran), pemerintah melalui Departemen Keuangan khususnya Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran menyusun PAN, sebagai pelaksanaan dari pasal 23 ayat (5) UUD 1945.

2.4.2.2 Sistem Baru Akuntansi Pemerintah Indonesia

Bukan hanya mengganti penggunaan sistem tata buku tunggal ke tata buku berpasangan, tetapi terdapat ciri-ciri lain yang membedakan dan perbaikan dari sistem yang dipakai sekarang yaitu sebagai berikut :

1. Sistem terpadu dan memudahkan untuk rekonsiliasi antar unit dan juga mudah menelusuri kembali jika diaudit nantinya.
2. Akuntansi anggaran dan akuntansi dana yang digunakan adalah single fund sistem.
3. Menganut sistem tata buku berpasangan.
4. Menerapkan asas kas untuk pendapatan dan belanja negara.
5. Ada standar dan prinsisp akuntansi
6. Adanya perkiraan standar yang seragam, antara perkiraan pembukuan dan kode pada anggaran harus seragam.
7. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi, tidak terpusat pada biro keuangan bagian anggaran saja.

Hal-hal tersebut diatas dimaksudkan agar akuntansi pemerintah tidak hanya untuk tujuan memenuhi pertanggungjawaban (accountability) semata-mata tetapi juga untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk tujuan-tujuan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian (tujuan menejerial) pada berbagai tingkat pemerintah.

Oleh kerena itu dalam memenuhi tujuan akuntabilitas dan tujuan menejerial, maka sistem aktuntansi pemerintah dibagi dua sistem utama yang mempunyai hubungan informasi timbal balik yaitu : Sistem Akuntansi Pusat (Sentral Accounting System/ CAO) yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan. Sistem Akuntansi Instansi (Agency Accounting System) yang diselenggarakan oleh Departemen/lembaga.

ad. 1. Sistem Akuntansi Pusat (Sentral Accounting System).

Sistem ini menganut dana tunggal dan memiliki tiga subsistem yaitu :

- Akuntansi Umum (General Accounting) yang akan menyelenggarakan pencatatan atas APBN , Allotment (pemberian) kepada bagian anggaran, realisasinya baik secara total maupun perbagian anggaran serta aset-aset lancar dan tetap berikut kewajiban lancarnya yang ada dalam pengelolaan bagian anggaran.
- Akuntansi Kas Umum Negara (Central State Tersury Accounting) yang akan mencatat transaksi-transaksi kas sehubungan dengan pelaksanaan APBN maupun no Anggaran serta aset dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut, saldo kas/bank dari semua kas negara dan rekening bank pemerintah kecuali saldo/kas bank dari bendaharawan penerima dan pembayar transfer-transfer kas antar kas-kas negara dan/atau rekening bank pemerintah pusat, wesel-wesel pemerintah serta pinjaman dan penanaman sementara.
- Akuntansi Bagiah Anggaran XVI yang akan menyelenggarakan pencatatan bagian anggaran ini atas allotments anggaran, realisasinya, kas dan bank yang berada pada bendaharawan-bendaharawan pembayar dan penerima dan atas aset/kewajiban lancar lainnya, aset tetap dan aset lainnya dalam pengelolaan proyek dan satuan kerja yang dibiayai bagian anggaran ini, penanaman permanen pemerintah pusat serta pinjaman jangka panjang pemerintah pusat.

Dengan ketiga akuntansi tersebut ,sistem ini diharpakan akan menghasilkan informasi akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai realisasi APBN atau dikenal saat ini dengan Perhitungan Anggaran Negara (PAN), neraca pemerintah pusat, posisi keuangan perbagian anggaran, pengluaran pemerintah pusat menurut sifat pengeluaran serta laporan-laporan lain sesuai dengan kebutuhan. Disamping itu dengan sistem ini diharapkan pemantauan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan APBN dan transaksi-transaksi pemerintah, pengecekan atas kebenaran dan kelengkapan pencatatan dan laporan keuangan yang diselenggarakan bagian anggaran, audit oleh pengawasan dangan efesien dan efektif memungkinkan untuk dilaksanakan.

ad.2. Sistem Akuntansi Instansi

Sistem ini merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai pelaksanaan APBN yang dialokasikan dan diotorisasikan kepada departemen/lembaga (bagian anggaran) dan terdiri dari empat subsistem yakni :

- Subsistem Akuntansi Setingkat Departemen/Lembaga (Agency level)
- Subsistem Akuntansi tingkat eselon I;
- Subsistem Akuntansi tingkat kantor wilayah Departemen/lembaga;
- Subsistem Akuntansi tingkat proyek;

Sistem ini diharapkan menghasilkan informasi akuntansi, dan pelaporan keuangan pembangunan mengenai realisasi dan otorisasi kredit anggaran atau yang lebih dikenal saat ini dengan sebutan Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA), neraca, dan laporan keuangan lain sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana halnya dengan sistem akuntansi pusat, pada sistem ini pemantauan, pengecekan dan audit diharapkan dapat dilaksanakan. Jika sistem akuntansi pusat memiliki tiga subsistem, sistem ini memiliki subsistem lebih banyak, seperti yang telah disebutkan di atas.

Ditingkat departemen/lembaga, subsistem ini akan menyajikan laporan keuangan konsolidasi untuk departemen/lembaga secara menyeluruh berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan dengan subsistem tingkat eselon I. Ditingkat eselon I akan diselenggarakan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan dari kantor-kantor yang berada di bawah eselon I yang bersangkutan dengan hasil berupa laporan konsolidasi untuk eselon I secara menyeluruh. Sementara itu ditingkat kantor akan diselenggarakan pencatatan transaksi-transaksi kuangan dari kantor departemen/lembaga diwilayah/propinsi yang akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasi dari kantor dan proyek dari eselon I yang bersangkutan di daerah/dipropinsi. Dipihak lain ditingkat proyek akan diselenggarakan pencatatan dan pelaporan keuangan atas transaksi keuangan di masing-masing proyek di bawah eselon I.

Dengan demikian laporan keuangan depertemen/lembaga disusun dengan cara mengkonsolidasikan laporan-laporan melalui tahap-tahap kontrak/proyek-wilayah/propinsi-eselon satu depertemen pusat.